

Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik

*Lambang Trijono*¹

Abstract

After the peace agreement Indonesia now in the post conflict era and many conflicts in the various part of Indonesia decreased. Democratization and decentralization brings improvement to the social, economic, and security condition in the society. This paper discuss the challenges of the post-conflict in various parts of Indonesia. The main focus of this paper is the approach and the strategy of post-conflict peace building in order to establish peace foundation to achieve peace consolidation and sustainable development

Kata-kata kunci:

post conflict; peace building; sustainable development

A. Pengantar

Indonesia kini memasuki masa pasca-konflik setelah konflik di daerah-daerah di Indonesia mereda baik karena telah dicapainya kesepakatan damai maupun karena sebab-sebab lain berlangsungnya demokratisasi dan desentralisasi yang membawa perbaikan pada kondisi sosial-ekonomi dan keamanan di masyarakat. Daerah-daerah yang dalam masa awal transisi demokrasi dilanda konflik, seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan lainnya, dan dalam

¹ Lambang Trijono adalah staf pengajar pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: trilambang@yahoo.com

tingkat tertentu mengalami konflik jauh sebelum berlangsung transisi demokrasi sebagai warisan konflik di masa lalu, seperti Aceh dan Papua (dalam kasus Aceh perjanjian damai telah dicapai, sedangkan dalam kasus Papua hingga kini masih mencari jalan keluar menemukan perdamaian), kini kondisinya berangsur-angsur membaik, telah memasuki era baru, menata kehidupan baru dalam politik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, menuju pemulihan pasca-konflik dan berusaha mengejar ketertinggalan untuk mencapai kemajuan pembangunan.

Namun, di tengah situasi membaik itu pertanyaan muncul sehubungan dengan berbagai masalah dan tantangan masih dihadapi untuk menuju situasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan ke depan setelah sekian lama dilanda konflik. Betulkah daerah-daerah pasca konflik ini telah menemukan kehidupannya yang baru? Apakah masalah-masalah menjadi sumber konflik dan dampak konflik dimasa lalu telah betul-betul teratasi? Kemana arah dari perkembangan terkini di daerah-daerah pasca konflik? Apakah betul-betul menuju konsolidasi perdamaian dan demokrasi atautkah masih menghadapi masalah-masalah yang mengancam daerah ini sehingga konflik bisa kembali terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan disini untuk memastikan bahwa memang pemulihan pasca-konflik berlangsung dan pembangunan perdamaian tumbuh berkembang di daerah-daerah ini. Memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik².

Membangun kembali masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik secara khusus, bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak

2 Tentang tantangan dan masalah dihadapi daerah pasca-konflik pada umumnya, lihat Jeroen de Zeeuw, 'Building Peace in War-Torn Society: From Concept to Strategy', NIIR, CCRU, Clingendael, August, 2001.

kembali muncul ke permukaan tetapi juga untuk mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan. Demikian itu selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik dan karakteristiknya di masa lalu sehingga bisa diantisipasi segala kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang, juga penting untuk memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh berkembang di masyarakat. Penguatan fondasi perdamaian dalam kaitan kebijakan pembangunan dengan perdamaian dan demokrasi, baik dalam prinsip-prinsip maupun mekanismenya, dalam hal ini penting untuk diperkuat bagi terselenggaranya pemerintahan efektif untuk mendorong transformasi konflik dan perdamaian jangka panjang di daerah-daerah ini.

Paper ini secara khusus membahas masalah-masalah dan tantangan dihadapi daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia dan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik diperlukan untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan keberlanjutan pembangunan. Fokus utama pembahasan ditujukan pada pendekatan dan strategi diperlukan untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan membangun fondasi perdamaian menuju tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

B. Masalah-masalah utama

Daerah-daerah pasca-konflik umumnya masih dalam kondisi perdamaian yang masih rentan (*peace vulnerabilities*) sehingga konflik mudah kembali muncul ke permukaan. Tantangan dihadapi terutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (*peace gaps*), yaitu kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan, dengan itu maka penting untuk dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (*fullfilling the peace gaps*) ini, baik pada level kebijakan maupun dalam praktik pembangunan perdamaian di tingkat komunitas.

Kesenjangan perdamaian bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa bersumber dari masalah-masalah lemahnya pencapaian

perdamaian (peace making) atau kesepakatan damai (peace accord/aggrement) dicapai. Bisa juga bersumber dari lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat. Bisa juga bersumber dari beratnya dampak atau beban masalah dihadapi akibat konflik di masa lalu.

Tinjauan kembali atas substansi kesepakatan damai, masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi kesepakatan damai di masyarakat dalam hal ini penting dilakukan. Dalam kasus Aceh, misalnya, memastikan sejauhmana hasil kesepakatan perjanjian Helsinki diimplementasikan secara nyata di masyarakat penting dilakukan. Demikian pula melakukan tinjauan kembali atas capaian perjanjian Malino dan implementasinya dalam kasus Maluku, Maluku Utara, dan Poso-Sulawesi Selatan, dan capaian perdamaian melalui Otsus dan implementasi Otsus di masyarakat dalam kasus Papua. Sejahteranya secara substansial perjanjian damai dicapai mampu menjawab masalah konflik yang ada dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat penting untuk dikaji guna memastikan tercapainya konsolidasi perdamaian dan keberlanjutan pembangunan di daerah pasca-konflik.

Sayangnya, kajian tentang masalah pencapaian perdamaian ini dan bagaimana implementasinya di masyarakat masih sangat minim kita temukan di Indonesia. Padahal kajian ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk memastikan konsolidasi perdamaian dan keberlangsungan pembangunan dicapai di daerah ini. Belajar dari pengalaman di berbagai negara, perjanjian damai seringkali gagal mencapai konsolidasi perdamaian, dan karena itu konflik mudah kembali terjadi. Hal itu terutama disebabkan kurang kuatnya konsensus nilai dari pencapaian perdamaian atau perjanjian damai dicapai dan lemahnya kelembagaan yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam mengimplementasikan perjanjian damai. Selain itu, kuat tertanamnya sejarah dan siklus konflik kekerasan di masa lalu, dan besarnya dampak kekerasan dan masalah-masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial-ekonomi dihadapi masyarakat pasca-konflik, ikut menambah bobot

masalah ini³.

Perjanjian damai secara substantif dikatakan kuat apabila ditopang oleh konsensus nilai yang luas (*broad based concensus*), melibatkan berbagai pihak sehingga mempunyai basis legitimasi politik yang kuat, dan karena itu berbagai pihak merasa memiliki dan berkomitmen mendukungnya. Dukungan kelompok-kelompok politik dominan, disertai koalisi dan pembagian kekuasaan diantara mereka, dan dukungan mayoritas penduduk atau konstituen perdamaian terhadap perjanjian damai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan perdamaian. Demikian itu akan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan dampak konflik di masa lalu, pemulihan, reintegrasi, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, pemenuhan keadilan transisional, dan perbaikan sosial-ekonomi, sebagai tantangan dan masalah utama harus dipecahkan oleh pembangunan perdamaian pasca-konflik⁴.

Namun, meski perjanjian damai secara substantif kuat, perdamaian tidak akan terwujud bila secara prosedural tidak disertai pendekatan dan kerangka kerja pembangunan perdamaian memadai sehingga bisa memastikan perjanjian damai berjalan dalam realitas kehidupan nyata. Masalah utama dalam implementasi perjanjian damai antara lain terdapat pada lemahnya kelembagaan, ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu atau spoiler yang tidak menginginkan perdamaian berlangsung, tidak adanya kepemimpinan memadai, lemahnya koalisi politik dan sipil mendukung perdamaian, dan hambatan-hambatan lain berkaitan dengan pembagian kekuasaan (*power sharing*) sesudah perjanjian dicapai dan lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi berlangsung di level komunitas. Demikian itu seringkali menimbulkan kesenjangan harapan, ekspektasi perdamaian dari perjanjian damai dicapai tidak sebanding

3 Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), *Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessons from Sri Lanka and Northern Ireland*, Forum Asia, SECSN, dan IDR, 2005; Colin Knox and Padraic Quirk, *Peace Building in Northern Ireland, Israel and South Africa*, MacMillan Press, 2000.

4 Siobhan Ni Chulchain, 'The Peace Frameworks and Peace Accord: A Comparative Analysis of Northern Ireland', dalam dalam Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), *Op.cit.*, 2005.

dengan implementasi pembangunan perdamaian dijalankan⁵.

Masih rentan atau belum terkonsolidasinya perdamaian ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik kembali muncul di masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan agar perjanjian damai berjalan efektif, upaya pencegahan konflik agar konflik kekerasan tidak kembali muncul menjadi agenda penting dalam masa pasca-konflik. Pencegahan konflik di masa pasca-konflik pada esensinya sama dengan memelihara perdamaian (*keeping the peace*). Upaya ini sangat penting dilakukan di daerah-daerah pasca-konflik mengingat kebanyakan daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, dan Papua, dulunya adalah daerah konflik berlarut-larut dan berlangsung cukup lama (*protracted conflicts*) disertai dampak kekerasan. Sejarah dan siklus konflik kekerasan itu begitu tertanam dalam sejarah konflik di daerah-daerah di Indonesia. Karena itu, pencegahan konflik di daerah ini masih penting untuk terus menerus dilakukan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika politik yang tinggi baik di pusat maupun di daerah.

Demokratisasi, dan juga desentralisasi, berkembang di daerah-daerah di Indonesia sekarang ini memang bisa meredakan konflik. Akan tetapi perubahan politik ini, di sisi lain, juga menciptakan perubahan-perubahan politik tersendiri, menciptakan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan politik, membangkitkan kecemasan-kecemasan politik sekaligus menumbuhkan harapan-harapan politik baru di kalangan elit politik, yang bisa meningkatkan eskalasi konflik di masyarakat⁶. Memahami dinamika konflik politik ini sangat penting terutama untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik berulang di masyarakat dan memastikan perdamaian terus berjalan. Kaitan perdamaian, demokrasi, dan kebijakan pembangunan dalam hal ini penting untuk diperkuat untuk konsolidasi perdamaian di daerah pasca-konflik.

C. Pembangunan perdamaian pasca-konflik

Pembangunan perdamaian pasca-konflik (*post-conflict peacebuilding*) boleh dikata merupakan topik baru dalam kajian dan

5 'The Peace Framework and Peace Accord', dalam dalam Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), *Ibid.*, 2005.

6 Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Yayasan Obor dan KITLV-Jakarta, 2007.

pembahasan akademis. Topik ini memang telah banyak dibicarakan dalam agenda pembangunan global⁷, tetapi masih sangat sedikit menjadi topik kajian dan bahasan kalangan akademis. Kalaupun kajian dan pembahasan dilakukan kebanyakan secara khusus belum terfokus pada kajian ini dan masih sangat luas berkaitan dengan pembangunan perdamaian dalam arti umum. Pembangunan perdamaian dalam arti ini umumnya hanya dimaknai sebagai upaya pembinaan damai atau penguatan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan perdamaian untuk membangun pondasi perdamaian di masyarakat.

Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik⁸.

Demikian pula dalam kaitannya dengan tujuan penyelesaian dan transformasi konflik, pemaduan keduanya perlu dikembangkan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik⁹. Bahkan, dalam situasi khusus ketika perjanjian damai gagal dijalankan dan masyarakat pasca-konflik kembali jatuh dalam konflik sekalipun, pendekatan penciptaan perdamaian (*peace making*) masih harus dipakai dan tidak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, semua pendekatan pembangunan perdamaian harus digunakan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik, terutama pendekatan yang mengarah kepada penyelesaian dan transformasi konflik menuju tercapainya perdamaian dan pembangunan jangka panjang.

7 Boutros-Boutros-Gali, *An Agenda for Peace*, United Nation, New York, 1996.

8 Kofi Anan, *Prevention of Armed Conflict*, Report of the Secretary General, United Nation, New York, 2002.

9 Boutros-Boutros Gali, *Op.cit*, 1996.

Beberapa kebutuhan penting perlu diidentifikasi untuk pengembangan kerangka pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik ini. Kerentanan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan jangka pendek pemulihan dan stabilitasi komunitas dan pembangunan perdamaian jangka panjang untuk mencapai konsolidasi perdamaian. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demokratis agar supaya kelembagaan pasca-konflik mampu secara efektif mengatasi masalah ini, terutama ketegangan-ketegangan struktural (*structural tensions*) yang ada, sangat penting dilakukan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini merupakan langkah strategis mengingat kapasitas kelembagaan pasca-konflik umumnya sangat lemah. Bahkan, di masa lalu seringkali menjadi bagian dari konflik, atau kalaupun tidak terlibat dalam konflik mereka terkena dampak dari konflik, sehingga di masa pasca-konflik lembaga-lembaga yang ada harus dipulihkan dan juga menjadi sasaran target dari pembangunan perdamaian.

Mengharapkan pemulihan dari lembaga yang dalam dirinya sendiri masih harus dipulihkan ini merupakan persoalan paling pelik dihadapi dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Bagian terpenting dari pemulihan kelembagaan pasca-konflik ini adalah, selain diperlukan pembentukan lembaga-lembaga baru demokratis untuk reintegrasi pasca-konflik, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan lembaga-lembaga pasca-konflik yang sudah ada, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil dan organisasi ekonomi dan sosial-kemasyarakatan lainnya, mengalami transformasi, atau mengalami metamorfosis, dalam dirinya menjadi lembaga pemangku pembangunan perdamaian. Semacam pembentukan atau pengembangan institusi negara atau masyarakat sipil baru (*state and nation building*) berorientasi pada pembangunan perdamaian dalam hal ini perlu dikembangkan.

Menjawab kebutuhan ini perlu dilakukan pembentukan konstitusi atau perundang-undangan untuk menopang pembangunan perdamaian (*constitution making for peacebuilding*). Pembentukan konstitusi ini merupakan cara strategis untuk membangun fondasi bangunan politik yang baru di daerah pasca-konflik, khususnya untuk mengatasi masalah pembagian kekuasaan (*power sharing*) dan pembentukan koalisi politik

diantara kelompok politik dominan¹⁰. Pembangunan perdamaian pasca-konflik akan efektif bila ditopang oleh konsensus dan koalisi politik yang kuat diantara pihak-pihak konflik dan kelompok-kelompok politik dominan. Termasuk didalamnya adalah kelembagaan lokal, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk mengelola pemerintahan.

Selain itu, pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian perlu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan pasca-konflik ini¹¹. Peka terhadap konflik disini dalam arti bahwa proses dan penentuan kebijakan pembangunan harus diorientasikan pada upaya pencegahan agar konflik tidak kembali terjadi atau perdamaian dan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan memasukkan analisis konflik dan perdamaian ke dalam kerangka kebijakan pembangunan. Penggunaan pendekatan ini bisa diharapkan akan menghasilkan prioritas kebijakan strategis dan agenda program pembangunan yang mampu mencegah konflik dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian.

Dalam konteks pasca-konflik, prioritas kebijakan strategis dan agenda program pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan hambatan perdamaian lainnya yang mengancam proses pembangunan dan perdamaian. Sebagai bagian terpenting dari prioritas strategis kebijakan pembangunan peka konflik ini adalah kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk transformasi ekonomi dari ekonomi perang (economy of war) yang berlaku di masa konflik menuju ekonomi perdamaian (economic of peace) di masa pasca-konflik. Tidak berkembangnya transformasi ekonomi dan masih berlangsungnya rejim ekonomi perang di masa pasca-konflik akan menghambat proses pembangunan perdamaian¹².

Melengkapi kedua kebutuhan strategis di atas, pengembangan

10 Kristi Samuels, 'Post-Conflict Peace Building and Constitution-Making', *Chicago Journal of International Law*, Vol 6, No.2. 2006.

11 Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian, Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik, the Padii Institute dan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2007.

12 International Peace Academy, 'Transforming War Economies: Challenges for Peacemaking and Peacebuilding', Report of the 27th Wison Park Conference in association with the International Peace Academy, Wiston House, Sussex, 27-29 October, 2003.

kelembagaan demokratis dan tata kelola pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan kebutuhan strategis perlu dikembangkan di daerah pasca-konflik, terutama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan negara dan masyarakat sipil dan lembaga pelayanan publik lainnya di tingkat lokal agar efektif memberikan pelayanan publik untuk mengatasi kerentanan-kerentanan dan hambatan perdamaian. Kebijakan dan pelayanan publik terutama diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dihadapi kelompok-kelompok rentan, kelompok memiliki beban konflik di masa lalu, seperti eks-pelaku konflik, eks-terpenjara politik, maupun kelompok korban konflik, agar supaya terintegrasi ke dalam komunitas untuk kembali dalam kehidupan normal dalam arti menjalankan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara mandiri di masyarakat¹³.

Ketiga aspek kebutuhan pembangunan perdamaian pasca-konflik di atas penting dijadikan acuan untuk menemukan kembali dan mengembangkan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Pengembangan kelembagaan pembangunan perdamaian demokratis dan genuine di tingkat lokal membutuhkan pondasi nilai-nilai perdamaian, pembangunan dan demokrasi, agar supaya mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang sensitif dan transformatif terhadap konflik, sekaligus mampu menumbuhkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Sebuah model pendekatan dan kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik dalam hal ini perlu dikembangkan untuk mengembangkan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang demokratis dan genuine di tingkat lokal.

D. Pengembangan kelembagaan pasca-konflik

Pengembangan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan komprehensif pembangunan perdamaian yang di dalamnya harus memadukan prinsip-prinsip nilai pembangunan, perdamaian, dan demokrasi, dalam kerangka kerja pembangunan perdamaian. Kaitan perdamaian, pembangunan dan

13 International Organization for Migration (IOM), 'Meta Analysis, Vulnerabilities, Stability, Displacement and Reintegration: Issues Facing the Peace Process in Aceh, Indonesia', IOM-OIM, August, 2008.

demokrasi (peace, development and democracy linkages), baik dalam prinsip nilai maupun dalam mekanisme kelembagaan, dalam hal ini perlu dikembangkan untuk menemukan model dan kerangka kerja kelembagaan pasca-konflik memadai.

Pendekatan pembangunan pasca konflik dengan mencoba memadukan kaitan perdamaian dan pembangunan sejauh ini telah dikembangkan sejumlah kalangan ahli. Pendekatan pembangunan sebagai perdamaian (peace as development) menekankan pentingnya pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian, atau pembangunan bertumpu perdamaian (peace-driven development), telah dikembangkan untuk mencegah konflik dan memajukan pembangunan perdamaian¹⁴. Demikian pula pendekatan pembangunan memadukan kaitan pembangunan dan demokrasi telah dikembangkan dalam model pembangunan parsipatoris¹⁵, pembangunan sebagai kebebasan¹⁶, dan pembangunan berpusat pada manusia¹⁷. Ketiga pendekatan tersebut menekankan pentingnya pembangunan demokratis dalam penentuan kebijakan pembangunan.

Namun, pendekatan pembangunan dengan memadukan dan memperkuat kaitan perdamaian dan demokrasi dalam hal ini masih belum mendapat perhatian memadai dari kalangan ahli. Sebuah model pembangunan perdamaian demokratis dalam hal ini perlu dikembangkan untuk pembangunan pasca-konflik, terutama untuk mengatasi dan menjawab masalah ketidakadilan yang selalu muncul dalam pembangunan pasca-konflik. Model demokrasi berbasis hak asasi manusia dari David Betham¹⁸ dalam hal penting untuk dijadikan acuan terutama untuk merumuskan strategi transformasi konflik berbasis hak-hak asasi manusia untuk mengatasi dan menjawab masalah keadilan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik¹⁹.

Memadukan ketiga prinsip nilai, yaitu nilai pembangunan, perdamaian dan demokrasi, pendekatan pembangunan perdamaian

14 Lambang Trijono, Op.Cit., 2007.

15 David C. Korten, *Kehidupan Setelah Kapitalisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

16 Amartya Sen, *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.

17 Sudjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia, 1974.

18 David Betham, *Democracy and Human Rights*. New York: Polity Press, 2001.

19 Michelle Parlevliet, 'Rethinking Conflict Transformation from a Human Rights Perspective', Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, September, 2009.

pasca-konflik perlu dikembangkan untuk mencapai konsolidasi perdamaian. Dalam pengembangan pendekatan ini, dimensi-dimensi nilai, kelembagaan dan perilaku aktor atau agensi perlu ditekankan untuk menghasilkan model kelembagaan pasca konflik memadai untuk mengatasi kerentanan perdamaian.

Pada tataran penentuan kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dimasukkan ke dalam tiap tahapan atau dalam proses pembangunan perdamaian pasca-konflik; mulai dari tahapan pemulihan, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, reintegrasi, rekonsiliasi atau transformasi konflik hingga tercapai konsolidasi perdamaian. Selain itu, dalam tiap tahapan atau proses pembangunan tersebut, prinsip-prinsip perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dijadikan acuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahapan proses penentuan kebutuhan, penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Sejauh ini setidaknya tiga model penentuan kebijakan pembangunan telah dikembangkan kalangan ahli yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Pertama, model penentuan kebijakan mengikuti logika perspektif teknokratis yang mengakui kebenaran objektif rasionalitas birokrasi dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan. Model ini lebih memfokus pada rasionalitas cara atau instrumental dalam mencapai hasil pembangunan, yaitu untuk menjawab persoalan bagaimana penentuan kebijakan dijalankan secara koheren dalam pelaksanaan atau implementasi pembangunan dengan tidak mempersoalkan manipulasi kepentingan ideologis yang sering terjadi dalam penentuan kebijakan.

Kedua, model penentuan kebijakan refleksif mengikuti logika perspektif kritis melakukan dekonstruksi dan pembongkaran kepentingan ideologis aktor-aktor politik dominan dibalik penentuan kebijakan. Model ini, mengikuti logika perspektif kritis berfokus pada rasionalitas nilai dalam pencapaian tujuan dengan melakukan dekonstruksi kepentingan ideologis untuk emansipasi dan perumahan kebijakan. Ketiga, model penentuan kebijakan kolaboratif menekankan pada pelibatan atau partisipasi dan akomodasi kepentingan berbagai pihak dalam penentuan kebijakan.

Dari ketiga model tersebut, tiga model kelembagaan pembangunan perdamaian pasca konflik disini bisa diidentifikasi, yaitu model teknokratis, model refleksif dan model kolaboratif. Ketiga model ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Oleh karena itu, ketiga model tersebut diatas dalam implementasinya perlu dikontekstualisasikan dalam realitas nyata pembangunan perdamaian pasca-konflik berdasar perbedaan tingkatan dinamika konflik, pencapaian perdamaian, dan perkembangan pembangunan perdamaian yang ada di daerah-daerah pasca-konflik. Kontekstualisasi dalam hal ini dilakukan dengan mengadaptasikan atau mengkontekstualisaikan ketiga model tersebut pada tingkatan dinamika konflik, pencapaian perdamaian dan perkembangan pembangunan perdamaian berlangsung di daerah pasca-konflik. Kontekstualisasi dan adaptasi model ini perlu dilakukan terutama untuk akomodasi dinamika, kebutuhan dan kapasitas pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik.

E. Kerangka kerja kelembagaan

Sebagaimana dikemukakan di muka, pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi dua masalah utama harus dipecahkan, yaitu bagaimana mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Kedua masalah ini menjadi tugas utama bekerjanya kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Kapasitas kelembagaan untuk mengatasi kedua masalah ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan perdamaian pasca-konflik.

E.1. Peringatan dan respon dini

Kerangka kerja kelembagaan untuk mencegah agar konflik tidak kembali muncul merupakan salah satu kebutuhan dihadapi kelembagaan pasca-konflik untuk memajukan pembangunan perdamaian. Kewaspadaan dan respon dini (*early warning and responses*) mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan dihadapi daerah-daerah pasca-konflik dalam hal ini sangat diperlukan. Memuat didalamnya sistem informasi dan indikator-indikator prediktif dan antisipatif penting terhadap segala

kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat, sistem kewaspadaan dan respon dini penting dikembangkan dan dijadikan acuan untuk mencegah konflik muncul kembali dan memajukan pembangunan perdamaian.

Pencegahan konflik sebenarnya tidak hanya penting untuk daerah konflik dan pasca-konflik saja tetapi juga daerah-daerah relatif stabil, yang dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan-perubahan sangat cepat terutama didorong kebijakan desentralisasi pembangunan. Percepatan perubahan ini bisa menimbulkan potensi konflik baru, terutama terjadi ketika demokratisasi belum mapan dan kuat tertanam atau terkonsolidasi di masyarakat. Kewaspadaan dan respon dini sangat diperlukan dan penting dikembangkan menjawab kebutuhan ini, tidak hanya dalam situasi konflik, atau pada saat krisis, tetapi juga pada masa pasca-konflik, atau bahkan ketika masyarakat dalam situasi stabil dan normal (stable peace).

Pemahaman atas sebab-sebab terjadi konflik, pendorong dan pemicu konflik, serta proses dan dinamikanya, penting dipertajam untuk merumuskan sistem tanggap dan respon dini. Sistem informasi tentang konflik disertai rumusan indikator-indikator prediktif dan antisipatif perlu dikembangkan sebagai acuan bertindak dan melakukan respon dan intervensi kebijakan pencegahan konflik dan pemajuan perdamaian. Berdasarkan kebutuhan ini, berbagai pilihan respon dan intervensi kebijakan dan agenda aksi sesuai kapasitas lokal juga bisa dilakukan, apakah lebih menekankan pencegahan konflik untuk menopang penciptaan perdamaian (peace making), atau resolusi konflik, ataukah untuk mendorong pembangunan perdamaian (peace building). Dengan itu, pencegahan konflik dalam keseluruhan spektrum dinamika konflik, dalam tahapan eskalasi dan de-eskalasinya bisa dilakukan.

Sebagai acuan bertindak dan respon kebijakan, sistem kewaspadaan dan respon dini perlu dikembangkan dalam pendekatan yang mencakup dan bisa digunakan dalam keseluruhan spektrum dinamika konflik, dengan menekankan pentingnya memberi tekanan khusus pada masalah dan kebutuhan masing-masing tahapan. Bagaimana memadukan kebutuhan adanya kerangka umum menjawab kebutuhan pencegahan konflik dalam keseluruhan spektrum dinamika konflik, disatu sisi, dan kebutuhan spesifik pada masing-masing tahapan, sesuai dengan situasi, kapasitas dan dinamika lokal, merupakan persoalan harus dipecahkan

dalam pengembangan kerangka kerja kewaspadaan dan respon dini secara nasional. Menjawab kebutuhan dan tantangan ini, pengembangan sistem kewaspadaan dan respon dini tidak hanya harus sensitif terhadap konflik tetapi juga promotif terhadap perdamaian jangka panjang. Sebagai acuan bertindak dalam penentuan kebijakan, maka kaitan antara sistem kewaspadaan dan respon dini dengan kerangka dan proses kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, penting ditekankan.

Sistem tanggap dan respon dini dibuat bukanlah untuk pengembangan sistem informasi atau pengumpulan data semata, melainkan untuk acuan bertindak dan penentuan respon dan intervensi kebijakan. Formulasi respon dan kebijakan sangat penting dalam kewaspadaan dan respon dini²⁰. Bagaimana menjadikan analisis konflik serta indikator-indikator konflik terpenting masuk ke dalam kerangka dan proses kebijakan dan secara praktis bisa dijadikan sebagai acuan bertindak dalam penentuan kebijakan sehingga kebijakan menjadi sensitif konflik dan promotif perdamaian²¹, merupakan kebutuhan penting dari sistem kewaspadaan dan respon dini berorientasi kebijakan.

Kaitan kewaspadaan dini dan respon kebijakan disini penting diperkuat untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai bentuk respon dan intervensi kebijakan dan pilihan-pilihan langkah-langkah agenda aksi, apakah pencegahan konflik, pencapaian damai, resolusi konflik, atau pembangunan damai, dengan itu bisa dirumuskan sesuai masalah dan kebutuhan dihadapi masing-masing tahapan konflik dan kapasitas lokal. Menjawab kebutuhan ini, penting dirumuskan kerangka pendekatan bersifat refleksif dan transformatif, untuk pencegahan konflik dan pemajuan perdamaian dalam perspektif jangka panjang, bukan hanya mencegah berkembangnya potensi konflik, mencegah agar konflik-kekerasan di masa lalu tidak kembali muncul, dan potensi konflik baru tidak berkembang, tetapi juga untuk memajukan pembangunan perdamaian.

20 Heinz Krummenacher and Susanne Schmeidi, 'Practical Challenges in Predicting Violent Conflict FAST: A Comprehensive Early-Warning Methodology', Berne, October, 2001.

21 Pemaduan analisis konflik ke dalam kerangka kebijakan merupakan pendekatan utama pembangunan sebagai perdamaian, untuk menghasilkan kebijakan sensitif konflik dan promotif perdamaian, lihat Lambang Trijono, Op.Cit., 2007.

Ketegangan struktural, potensi konflik dan kecenderungan konflik terbuka atau konflik-kekerasan manifes, merupakan tantangan utama dihadapi masyarakat pre-konflik dan pasca-konflik. Analisis konflik untuk identifikasi faktor-faktor utama sumber penyebab dan mendasari konflik, mendorong konflik muncul ke permukaan, dan faktor-faktor pemicu konflik, dilakukan dalam analisis ini. Kesenjangan perdamaian dan kerentanan perdamaian merupakan penghambat perdamaian utama terutama dihadapi masyarakat pasca-konflik, sehingga konflik-kekerasan dimungkinkan bisa muncul kembali. Selain faktor pendorong konflik, lemahnya atau tidak efektifnya pencapaian dan pembangunan perdamaian, atau faktor pendorong perdamaian, merupakan sebab-sebab utama dari sisi lain yang menyebabkan konflik mudah terjadi. Analisis perdamaian diperlukan untuk identifikasi faktor-faktor pendorong perdamaian ini dan indikator-indikator perdamaian penting diperlukan untuk peningkatan kapasitas perdamaian.

Mengurangi potensi konflik, atau de-eskalasi konflik, di satu sisi, dan meningkatkan kapasitas perdamaian, di sisi lain, merupakan kebutuhan strategis dalam perumusan kebijakan sensitif konflik dan promotif perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Peluang untuk bertindak dan menentukan respon dan intervensi kebijakan dalam pencegahan konflik dan pemajuan perdamaian ditemukan dari analisis respon kebijakan sensitif konflik. Berpijak pada potensi konflik dan kapasitas perdamaian, analisis respon dilakukan untuk mengatasi kerentanan dan skenario, peluang dan pilihan-pilihan kebijakan bisa diambil untuk pencegahan konflik, pencapaian perdamaian, atau resolusi konflik dan pembangunan damai.

E.2. Penentuan kebutuhan

Selain itu, penting pula dalam kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik ini dirumuskan bagaimana penentuan kebutuhan dilakukan sebagai acuan untuk penentuan kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik membutuhkan assesmen terhadap kebutuhan-kebutuhan diperlukan secara spesifik terkait dengan pemecahan masalah-masalah utama dihadapi daerah pasca-konflik. Masalah utama pembangunan perdamaian di daerah

pasca-konflik pada dasarnya bersumber dari tiga hal, yaitu akar-akar struktural dan kultural konflik di masa lalu (kesenjangan, ketidakadilan, krisis kelembagaan) yang masih belum sepenuhnya teratasi, dampak konflik kekerasan di masa lalu terhadap kemerosotan kualitas hidup warga (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi, dsb), dan belum efektifnya implementasi perjanjian damai atau pembangunan perdamaian.

Ketiga masalah ini menciptakan potensi konflik atau konflik terpendam tersendiri di daerah pasca-konflik berupa tensi-tensi struktural (*structural tensions*) berlangsung yang setiap saat bisa meledak menjadi konflik aktual terbuka (*open/manifest conflict*) di masyarakat, terutama ketika kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintah tidak mampu efektif mengatasi masalah ini. Kerentanan perdamaian bersumber dari tiga masalah tersebut perlu ditemukan sebelum respon atau intervensi kebijakan pencegahan konflik dan pembangunan digulirkan. Kerentanan perdamaian merupakan kondisi kesenjangan perdamaian (*peace gaps*) bersumber dari warisan masalah-masalah konflik di masa lalu dan lemahnya kapasitas perdamaian dari respon dan intervensi pembangunan dilakukan sesudah perjanjian atau pencapaian damai dilakukan.

Assesmen dengan demikian dilakukan setidaknya memuat dua macam jenis assesmen penting, yaitu: assesmen atas dampak konflik di masa lalu pada masyarakat (*conflict impact assesment*), dan assesmen terhadap dampak respon pembangunan pada peningkatan kapasitas perdamaian (*peace impact assesmen*). Hasil kombinasi keduanya kemudian dijadikan masukan bagi penentuan kebijakan agar kebijakan menjadi sensitif konflik dan promotif memajukan perdamaian. Berikut ini beberapa aspek penting perlu mendapat perhatian dalam penentuan kebutuhan ini untuk perumusan prioritas kebijakan dan kegiatan pembangunan perdamaian pasca-konflik.

E.2.1. Assesmen dampak konflik

Assesmen terhadap dampak konflik di masa lalu dilakukan untuk mengetahui situasi konflik terkini, mengidentifikasi kecenderungan kembali terjadinya konflik (*conflict trend/relapsed*) yang bisa membuyarkan upaya perdamaian. Meskipun demikian faktor-faktor konflik lain, terutama yang

mendasari terjadinya konflik tetap penting diperhitungkan. Kecenderungan konflik terkini bisa diidentifikasi dari bekerjanya tiga faktor utama, yaitu: (1) situasi konflik terkini (ketegangan atau tensi struktural bersumber dari akar konflik di masa lalu belum tertangani ditambah dampak konflik pada masyarakat); (2) pendorong konflik (perubahan-perubahan berlangsung seperti kebijakan yang men-drive konflik, krisis ekonomi, de-agrarianisasi, urbanisasi, dinamika politik lokal dan nasional, dsb); dan (3) pemicu konflik (sengketa-sengketa warga terkait pemanfaatan sumberdaya dalam kehidupan sehari-hari). Hasil assemen ketiganya menghasilkan indeks kerentanan konflik (*conflict vulnerabilities index*) mengindikasikan tingkat kerawanan daerah-daerah pasca-konflik. Perubahan-perubahan berlangsung di masyarakat yang mendorong potensi konflik terpendam muncul ke permukaan dan tensi-tensi sosial meningkat, perlu mendapat tekanan perhatian khusus dalam asesmen.

E.2.2. Asesmen dampak perdamaian

Asesmen dampak perdamaian dilakukan atas kapasitas perdamaian masyarakat dari respon agen pembangunan dilakukan selama ini terhadap konflik dan dampaknya, meliputi visi atau tujuan perdamaian dirumuskan (*substantif*) dan strategi, program, kegiatan-kegiatan dijalankan (*implementatif*) dan capaian hasilnya. Kesenjangan keduanya, antara tujuan dan pendekatan ideal hendak dicapai dalam pembangunan perdamaian dan pilihan-pilihan strategi atau cara dijalankan mencapai tujuan perdamaian menghasilkan kapasitas perdamaian (*dampak positif*) dan kerentanan perdamaian (*dampak negatif*). Asesmen dilakukan atas masalah-masalah penting kapasitas dan kerentanan perdamaian, meliputi visi atau tujuan perdamaian (*muatan substantif prinsip-prinsip nilai perdamaian dijadikan dasar acuan*) dan pendekatan, strategi, program dan kegiatan dijalankan (*aspek implementatif atau prosedur operasionalisasi*). Keduanya menghasilkan capaian hasil apakah berdampak positif (*peningkatan kapasitas*) ataukah negatif (*kerentanan*) perdamaian.

E.2.3. Pemetaan aktor dan agenda

Selain pada level makro masyarakat, pemetaan aktor konflik dan aktor perdamaian pada level agensi atau individual berserta agendanya

penting dilakukan untuk prediksi dan antisipasi kecenderungan konflik dan perdamaian nyata berlangsung di masyarakat. Assesmen terhadap agenda aktor, baik aktor konflik yang masih ada (spoiler atau kelompok garis keras) dan aktor perdamaian (pemangku perdamaian) penting dilakukan. Assesmen dilakukan atas agenda, strategi, peran, sumberdaya digunakan, dan relasi antar aktor atau agensi dalam mendorong dinamika konflik atau mendorong perdamaian. Keduanya menghasilkan kekuatan-kekuatan yang mendorong konflik atau mendorong perdamaian yang bisa dijadikan prediksi dan antisipasi kecenderungan konflik dan perdamaian dari segi agenda aktor-aktor di daerah.

E.2..4. Peluang respon dan bertindak

Jendela peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian (windows opportunities for peace building) bisa diidentifikasi dari hasil assesmen atas dampak konflik, dampak perdamaian, dan dinamika aktor tersebut diatas. Assesmen terhadap peluang-peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian dilakukan atas keseluruhan aspek-aspek penting dampak konflik dan dampak perdamaian sebagaimana disebutkan dimuka, meliputi: (1) kerentanan konflik; (2) kerentanan perdamaian; (3) skenario ke depan; dan (4) respon dan intervensi bisa diambil dari skenario-skenario mungkin terjadi, skenario terburuk, moderat dan terbaik, dalam ranah kebijakan dan aksi.

E.2.5. Kapasitas kelembagaan

Setelah peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian teridentifikasi, kapasitas kelembagaan untuk menjalankannya penting dilakukan. Assesmen terhadap kapasitas kelembagaan dilakukan atas aspek-aspek peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi: substansi (prinsip nilai, komitmen, pendekatan, dsb), implementatif (pendekatan, strategi, kerangka kerja, dsb) kelembagaan (organisasi, staf, dsb), sumberdaya finansial (finansial, dukungan donor, sustainabilitas pendanaan, dsb), konstituen (konstituen dan lokasi).

F. Penutup dan rekomendasi

Paparan di atas memberikan dasar acuan bagi berbagai pihak untuk memajukan pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca-

konflik di Indonesia berdasar analisis situasi konflik dan perdamaian terkini untuk merumuskan respon kebijakan strategis dan agenda aksi pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca-konflik. Daerah-daerah pasca-konflik menghadapi tantangan dan hambatan perdamaian khusus dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, bersumber dari bukan hanya masalah-masalah konflik dan kekerasan di masa lalu, tetapi juga kerentanan perdamaian di masyarakat disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian dilakukan. Tantangan ini membutuhkan pendekatan dan strategi khusus untuk mengatasinya, terutama agar konflik-kekerasan tidak kembali muncul (relapsed), dan perdamaian berkelanjutan bisa dicapai di daerah-daerah pasca-konflik.

Menjawab tantangan ini, diperlukan pemahaman atas konflik-kekerasan terjadi selama ini, baik dari segi pola maupun karakteristiknya, sehingga bisa dicegah kemungkinan dan kecenderungan terjadinya konflik kembali muncul ke permukaan. Disini, selain penting melakukan analisis terhadap situasi konflik, analisis terhadap situasi perdamaian terkini juga perlu ditekankan. Keduanya, baik analisis situasi konflik maupun analisis perdamaian terkini, sama-sama penting dilakukan untuk merumuskan pendekatan, strategi dan kerangka kerja pembangunan perdamaian, agar kerangka dihasilkan mampu bukan hanya menangkap realitas potensi konflik yang ada, tetapi juga mampu menjawab tantangan perdamaian dihadapi. Bagaimana mengurangi potensi konflik agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan, di satu sisi, dan bagaimana meningkatkan kapasitas perdamaian yang ada, di sisi lain, merupakan agenda penting harus dilakukan dalam setiap upaya menjaga dan membangun perdamaian di daerah pasca-konflik.

Kajian, assesmen dan analisis terhadap situasi konflik terkini penting dilakukan dengan memfokus pada sebab-sebab, atau akar penyebab, terjadinya konflik, pada aktor, proses dan dinamika konflik, untuk ditemukan pola, karakteristik dan kecenderungannya, sehingga diprediksi untukantisipasi dan langkah pencegahan konflik ke depan. Sementara, analisis situasi perdamaian dilakukan dengan memusatkan perhatian pada faktor-faktor pendukung pencapaian perdamaian, implemenatasi perjanjian damai di masyarakat, kapasitas kelembagaan perdamaian, dan kegiatan perdamaian berkembang di masyarakat. Berdasar kedua analisis tersebut, respon kebijakan strategis pemeliharaan

perdamaian, atau pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan pentingnya pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian dalam jangka panjang. Pembangunan perdamaian tidak hanya bersifat transisional, tetapi sekaligus juga transformatif dan rekonsiliatif menuju tercapainya perdamaian dan keadilan berkelanjutan. Selain itu, kapasitas kelembagaan dan agen pembangunan perdamaian, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil, penting untuk ditingkatkan, untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah dihadapi daerah pasca-konflik.

Membangun perdamaian di daerah pasca-konflik dengan demikian tidak hanya membutuhkan kepekaan atau sensitivitas tinggi atas potensi konflik dan ketegangan struktural yang ada di masyarakat, tetapi juga kapasitas kelembagaan memadai untuk menumbuhkembangkan perdamaian. Kebijakan dan agenda aksi pemeliharaan dan pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik selain harus sensitif terhadap konflik, untuk mencegah segala kemungkinan munculnya kembali konflik ke permukaan, juga harus promotif terhadap perdamaian, sehingga kebijakan dan agenda aksi digulirkan akan memberikan kontribusi yang luas bagi terciptanya perdamaian dan pembangunan.*****

Daftar Pustaka

- Anan, Kofi (2002). *Prevention of Armed Conflict, Report of the Secretary General, United Nation, New York.*
- Askandar, Kamarulzaman and Ang Ming Chee, eds. (2005). *Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessons from Sri Lanka and Northern Ireland, Forum Asia, SECSN, dan IDR*
- Betham, David, (2001). *Democracy and Human Rights. New York: Polity Press.*
- Chulchain, Siobhan Ni (2005). 'The Peace Frameworks and Peace Accord: A Comparative Analysis of Northern Ireland', dalam

Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), *Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessons from Sri Lanka and Northern Ireland*, Forum Asia, SECSN, dan IDR.

de Zeeuw, Jeroen (2001). 'Building Peace in War-Torn Society: From Concept to Strategy', NIIR, CCRU, Clingendael, Agustus.

Gali, Boutros-Boutros (1996). *An Agenda for Peace*. New York: United Nation.

International Peace Academy, (2003). 'Transforming War Economies: Challenges for Peacemaking and Peace building,' Report of the 27th Wison Park Conference in association with the International Peace Academy, Wiston House, Sussex, 27-29 Oktober.

International Organization for Migration (IOM), 'Meta Analysis, Vulnerabilities, Stability, Displacement and Reintegration: Issues Facing the Peace Process in Aceh, Indonesia', IOM-OIM, August, 2008.

Knox, Colin and Padraic Quirk, (2000). *Peace Building in Northern Ireland, Israel and South Africa*, New York: MacMillan Press.

Korten, David C. (2002). *Kehidupan Setelah Kapitalisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Krummenacher, Heinz and Susanne Schmeidi, (2001). 'Practical Challenges in Predicting Violent Conflict FAST: A Comprehensive Early-Warning Methodology', Berne, October.

Parlevliet, Michelle (2009). 'Rethinking Conflict Transformation from a Human Rights Perspective', Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, September.

Samuels, Kristi (2006). 'Post-Conflict Peace Building and Constitution-Making', *Chicago Journal of International Law*, Vol 6, No.2.

Sen, Amartya (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.

Sudjatmoko, (1974). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1974.

Trijono, Lambang (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian, Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, Jakarta: the Padii Institute dan Yayasan Obor Indonesia.

Van Klinken, Gerry (2007). *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV